

1	1.01.02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN
2	1.01.03	PROGRAM PENGEMBANGAN KURIKULUM
3	1.01.04	PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN
4	1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT
5	1.02.03	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN
6	1.02.04	PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN
7	1.03.02	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)
8	1.03.03	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM
9	1.03.04	PROGRAM PENGEMBANGAN SISTEM DAN PENGELOLAAN PERSAMPAHAN REGIONAL
10	1.03.05	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH
11	1.03.06	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE
12	1.03.07	PROGRAM PENGEMBANGAN PERMUKIMAN
13	1.03.08	PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG
14	1.03.09	PROGRAM PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGANNYA
15	1.03.10	PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN
16	1.03.11	PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI
17	1.03.12	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG
18	1.04.02	PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN
19	1.04.03	PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN
20	1.04.04	PROGRAM PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH
21	1.04.05	PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)
22	1.05.02	PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM
23	1.05.03	PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA
24	1.06.02	PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL
25	1.06.03	PROGRAM PENANGANAN WARGA NEGARA MIGRAN KORBAN TINDAK KEKERASAN
26	1.06.04	PROGRAM REHABILITASI SOSIAL
27	1.06.05	PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL
28	1.06.06	PROGRAM PENANGANAN BENCANA
29	1.06.07	PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN
30	2.07.03	PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA
31	2.07.04	PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA
32	2.07.05	PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL
33	2.08.02	PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN
34	2.08.03	PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN
35	2.08.04	PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA
36	2.08.06	PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)
37	2.08.07	PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK
38	2.09.02	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA EKONOMI UNTUK KEDAULATAN DAN KEMANDIRIAN PANGAN
39	2.09.03	PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT
40	2.09.04	PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN
41	2.09.05	PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN
42	2.10.04	PROGRAM PENYELESAIAN SENGKETA TANAH GARAPAN
43	2.10.05	PROGRAM PENYELESAIAN GANTI KERUGIAN DAN SANTUNAN TANAH UNTUK PEMBANGUNAN
44	2.10.08	PROGRAM PENGELOLAAN TANAH KOSONG
45	2.11.02	PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP
46	2.11.03	PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP
47	2.11.04	PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)
48	2.11.05	PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH B3)
49	2.11.06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)
50	2.11.08	PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT
51	2.11.09	PROGRAM PENGHARGAAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT
52	2.11.10	PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP
53	2.11.11	PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN
54	2.12.02	PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK
55	2.12.03	PROGRAM PENCATATAN SIPIL
56	2.12.04	PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN
57	2.12.05	PROGRAM PENGELOLAAN PROFIL KEPENDUDUKAN
58	2.13.02	PROGRAM PENATAAN DESA
59	2.13.03	PROGRAM PENINGKATAN KERJASAMA DESA
60	2.13.04	PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA
61	2.13.05	PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT
62	2.14.02	PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK
63	2.14.03	PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)
64	2.14.04	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)
65	2.15.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)
66	2.15.03	PROGRAM PENGELOLAAN PELAYARAN
67	2.16.02	PROGRAM INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK
68	2.16.03	PROGRAM APLIKASI INFORMATIKA
69	2.17.02	PROGRAM PELAYANAN IZIN USAHA SIMPAN PINJAM
70	2.17.03	PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI
71	2.17.04	PROGRAM PENILAIAN KESEHATAN KSP/USP KOPERASI
72	2.17.05	PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN
73	2.17.06	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI
74	2.17.07	PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)
75	2.17.08	PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM

76	2.18.02	PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL
77	2.18.03	PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL
78	2.18.04	PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL
79	2.18.05	PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL
80	2.18.06	PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL
81	2.19.02	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN
82	2.19.03	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAHAAN
83	2.20.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL
84	2.21.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI
85	2.22.02	PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN
86	2.22.03	PROGRAM PENGEMBANGAN KESENIAN TRADISIONAL
87	2.23.02	PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN
88	2.24.02	PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP
89	2.24.03	PROGRAM PERLINDUNGAN DAN PENYELAMATAN ARSIP
90	3.25.03	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP
91	3.25.04	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA
92	3.25.06	PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN
93	3.26.02	PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA
94	3.26.03	PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA
95	3.26.04	PROGRAM PENGEMBANGAN EKONOMI KREATIF MELALUI PEMANFAATAN DAN PERLINDUNGAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL
96	3.26.05	PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF
97	3.27.02	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN
98	3.27.03	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN
99	3.27.04	PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER
100	3.27.05	PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN
101	3.27.06	PROGRAM PERIZINAN USAHA PERTANIAN
102	3.27.07	PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN
103	3.30.02	PROGRAM PERIZINAN DAN PENDAFTARAN PERUSAHAAN
104	3.30.03	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN
105	3.30.04	PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING
106	3.30.05	PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR
107	3.30.06	PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN
108	3.30.07	PROGRAM PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI
109	3.31.02	PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI
110	3.31.03	PROGRAM PENGENDALIAN IZIN USAHA INDUSTRI KABUPATEN/KOTA
111	3.31.04	PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL
112	3.32.03	PROGRAM PEMBANGUNAN KAWASAN TRANSMIGRASI
113	3.32.04	PROGRAM PENGEMBANGAN KAWASAN TRANSMIGRASI
114	4.01.02	PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT
115	4.01.03	PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN
116	4.02.02	PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD
117	5.01.02	PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH
118	5.01.03	PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
119	5.02.02	PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH
120	5.02.03	PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH
121	5.02.04	PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH
122	5.03.02	PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH
123	5.05.02	PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
124	6.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN
125	6.01.03	PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI
126	7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK
127	7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN
128	7.01.04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM
129	7.01.05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM
130	7.01.06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA
131	8.01.02	PROGRAM Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan
132	8.01.03	PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK
133	8.01.04	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN
134	8.01.05	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA
135	8.01.06	PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL
136	X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA

1	1.01.02.2.01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar
2	1.01.02.2.02	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama
3	1.01.02.2.03	Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)
4	1.01.02.2.04	Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan
5	1.01.03.2.01	Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Dasar
6	1.01.04.2.01	Pemerataan Kuantitas dan Kualitas Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan
7	1.02.02.2.01	Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota
8	1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
9	1.02.02.2.03	Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan secara Terintegrasi
10	1.02.02.2.04	Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
11	1.02.03.2.02	Perencanaan Kebutuhan dan Pemanfaatan Sumberdaya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota
12	1.02.03.2.03	Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
13	1.02.04.2.03	Penerbitan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga
14	1.02.04.2.06	Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Post Market pada Produksi dan Produk Makanan Minuman Industri Rumah Tangga
15	1.03.02.2.01	Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota
16	1.03.02.2.02	Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya dibawah 1000 Ha dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota
17	1.03.03.2.01	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota
18	1.03.04.2.01	Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan di Daerah Kabupaten/Kota
19	1.03.05.2.01	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota
20	1.03.06.2.01	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai dalam Daerah Kabupaten/Kota
21	1.03.07.2.01	Penyelenggaraan Infrastruktur pada Permukiman di Kawasan Strategis Daerah Kabupaten/Kota
22	1.03.08.2.01	Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten/Kota, Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung
23	1.03.09.2.01	Penyelenggaraan Penataan Bangunan dan Lingkungannya di Daerah Kabupaten/Kota
24	1.03.10.2.01	Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota
25	1.03.11.2.01	Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi
26	1.03.11.2.02	Penyelenggaraan Sistem Informasi Jasa Konstruksi Cakupan Daerah Kabupaten/Kota
27	1.03.11.2.03	Penerbitan Izin Usaha Jasa Konstruksi Nasional (Non Kecil dan Kecil)
28	1.03.11.2.04	Pengawasan Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan dan Tertib Pemanfaatan Jasa Konstruksi
29	1.03.12.2.01	Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Rinci Tata Ruang (RRTR) Kabupaten/Kota
30	1.03.12.2.02	Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Tata Ruang Daerah Kabupaten/Kota
31	1.03.12.2.03	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota
32	1.03.12.2.04	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota
33	1.04.02.2.01	Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota
34	1.04.02.2.06	Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan Perumahan
35	1.04.03.2.02	Penataan dan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (sepuluh) Ha
36	1.04.03.2.03	Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (sepuluh) Ha
37	1.04.04.2.01	Pencegahan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh pada Daerah Kabupaten/Kota
38	1.04.05.2.01	Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan
39	1.05.02.2.01	Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota
40	1.05.02.2.02	Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Wali Kota
41	1.05.02.2.03	Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Kabupaten/Kota
42	1.05.03.2.02	Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana
43	1.06.02.2.03	Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota
44	1.06.03.2.01	Pemulangan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan dari Titik Debarkasi di Daerah Kabupaten/Kota untuk dipulangkan ke Desa/Kelurahan Asal
45	1.06.04.2.01	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial
46	1.06.04.2.02	Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial
47	1.06.05.2.01	Pemeliharaan Anak-Anak Terlantar
48	1.06.05.2.02	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota
49	1.06.06.2.01	Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota
50	1.06.06.2.02	Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten/Kota
51	1.06.07.2.01	Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota
52	2.07.03.2.04	Konsultasi Produktivitas pada Perusahaan Kecil
53	2.07.04.2.03	Pengelolaan Informasi Pasar Kerja
54	2.07.04.2.04	Pelindungan PMI (Pra dan Purna Penempatan) di Daerah Kabupaten/Kota
55	2.07.05.2.02	Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah Kabupaten/Kota
56	2.08.02.2.01	Pelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kabupaten/Kota
57	2.08.02.2.02	Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi Kemasyarakatan Kewenangan Kabupaten/Kota
58	2.08.02.2.03	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota
59	2.08.03.2.01	Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota
60	2.08.03.2.02	Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang Memerlukan Koordinasi Kewenangan Kabupaten/Kota
61	2.08.03.2.03	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
62	2.08.04.2.01	Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan Hak Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
63	2.08.06.2.01	Pelembagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Nonpemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota
64	2.08.06.2.02	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota
65	2.08.07.2.01	Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak yang Melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Kabupaten/Kota
66	2.08.07.2.02	Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
67	2.08.07.2.03	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
68	2.09.02.2.01	Penyediaan Infrastruktur dan Seluruh Pendukung Kemandirian Pangan sesuai Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota
69	2.09.03.2.01	Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan
70	2.09.03.2.02	Pengelolaan dan Keseimbangan Cadangan Pangan Kabupaten/Kota
71	2.09.03.2.03	Penentuan Harga Minimum Daerah untuk Pangan Lokal yang Tidak Ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi
72	2.09.03.2.04	Pelaksanaan Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi

73	2.09.04.2.01	Penyusunan Peta Kerentanan dan Ketahanan Pangan Kecamatan
74	2.09.04.2.02	Penanganan Kerawanan Pangan Kewenangan Kabupaten/Kota
75	2.09.05.2.01	Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Daerah Kabupaten/Kota
76	2.10.04.2.01	Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan dalam Daerah Kabupaten/Kota
77	2.10.05.2.01	Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota
78	2.10.08.2.02	Inventarisasi dan Pemanfaatan Tanah Kosong
79	2.11.02.2.01	Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Kabupaten/Kota
80	2.11.03.2.01	Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota
81	2.11.03.2.03	Pemulihan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota
82	2.11.04.2.01	Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kabupaten/Kota
83	2.11.05.2.01	Penyimpanan Sementara Limbah B3
84	2.11.06.2.01	Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan dan Izin PPLH diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota
85	2.11.08.2.01	Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
86	2.11.09.2.01	Pemberian Penghargaan Lingkungan Hidup Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
87	2.11.10.2.01	Penyelesaian Pengaduan Masyarakat di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) Kabupaten/Kota
88	2.11.11.2.01	Pengelolaan Sampah
89	2.11.11.2.03	Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Sampah yang Diselenggarakan oleh Pihak Swasta
90	2.12.02.2.01	Pelayanan Pendaftaran Penduduk
91	2.12.02.2.02	Penataan Pendaftaran Penduduk
92	2.12.02.2.03	Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk
93	2.12.02.2.04	Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk
94	2.12.03.2.01	Pelayanan Pencatatan Sipil
95	2.12.03.2.02	Penyelenggaraan Pencatatan Sipil
96	2.12.03.2.03	Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pencatatan Sipil
97	2.12.04.2.01	Pengumpulan Data Kependudukan dan Pemanfaatan dan Penyajian Database Kependudukan
98	2.12.04.2.03	Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan
99	2.12.04.2.04	Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan
100	2.12.05.2.01	Penyusunan Profil Kependudukan
101	2.13.02.2.01	Penyelenggaraan Penataan Desa
102	2.13.03.2.01	Fasilitasi Kerja sama antar Desa
103	2.13.04.2.01	Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa
104	2.13.05.2.01	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama dalam Daerah Kabupaten/Kota
105	2.14.02.2.02	Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kabupaten/Kota
106	2.14.03.2.01	Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB sesuai Kearifan Budaya Lokal
107	2.14.03.2.02	Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB/Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB)
108	2.14.03.2.03	Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kabupaten/Kota
109	2.14.03.2.04	Pemberdayaan dan Peningkatan Peran serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB
110	2.14.04.2.01	Pelaksanaan Pembangunan Keluarga melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga
111	2.15.02.2.02	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota
112	2.15.02.2.03	Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe C
113	2.15.02.2.04	Penerbitan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir
114	2.15.02.2.05	Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor
115	2.15.02.2.06	Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota
116	2.15.02.2.09	Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang antar Kota dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota
117	2.15.02.2.16	Penetapan Tarif Kelas Ekonomi untuk Angkutan Orang yang Melayani Trayek serta Angkutan Perkotaan dan Perdesaan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota
118	2.15.03.2.02	Penerbitan Izin Usaha Angkutan Laut Pelayaran Rakyat bagi Orang Perorangan atau Badan Usaha yang Berdomisili dan yang Beroperasi pada Lintas Pelabuhan dalam Daerah Kabupaten/Kota
119	2.16.02.2.01	Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota
120	2.16.03.2.01	Pengelolaan Nama Domain yang telah Ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota
121	2.16.03.2.02	Pengelolaan e-government Di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota
122	2.17.02.2.01	Penerbitan Izin Usaha Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota
123	2.17.03.2.01	Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi, Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/ Kota
124	2.17.04.2.01	Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota
125	2.17.05.2.01	Pendidikan dan Latihan Perkoperasian Bagi Koperasi yang Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota
126	2.17.05.2.03	Pendidikan dan Pelatihan SDM Usaha Mikro dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota
127	2.17.06.2.01	Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/Kota
128	2.17.07.2.01	Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan
129	2.17.08.2.01	Pengembangan Usaha Mikro dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Kecil
130	2.18.02.2.01	Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Dibiidang Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota
131	2.18.02.2.02	Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota
132	2.18.03.2.01	Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota
133	2.18.04.2.01	Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota
134	2.18.05.2.01	Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota
135	2.18.06.2.01	Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
136	2.19.02.2.01	Penyadaran, Pemberdayaan, dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan Terhadap Pemuda Pelopor Kabupaten/Kota, Wirausaha Muda Pemula, dan Pemuda Kader Kabupaten/Kota
137	2.19.03.2.02	Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
138	2.19.03.2.04	Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Olahraga
139	2.19.03.2.05	Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Rekreasi
140	2.20.02.2.01	Penyelenggaraan Statistik Sektor di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota
141	2.21.02.2.01	Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota
142	2.21.02.2.02	Penetapan Pola Hubungan Komunikasi Sandi Antar Perangkat Daerah Kabupaten/Kota
143	2.22.02.2.01	Pengelolaan Kebudayaan yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota
144	2.22.03.2.01	Pembinaan Kesenian yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota

145	2.23.02.2.01	Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
146	2.23.02.2.02	Pembudayaan Gemar Membaca Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
147	2.24.02.2.01	Pengelolaan Arsip Dinamis Daerah Kabupaten/Kota
148	2.24.02.2.03	Pengelolaan Simpul Jaringan Informasi Kearsipan Nasional Tingkat Kabupaten/Kota
149	2.24.03.2.04	Autentikasi Arsip Statis dan Arsip Hasil Alih Media Kabupaten/Kota
150	3.25.03.2.01	Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang dapat Diusahakan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/ Kota
151	3.25.03.2.02	Pemberdayaan Nelayan Kecil dalam Daerah Kabupaten/Kota
152	3.25.03.2.03	Pengelolaan dan Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI)
153	3.25.04.2.01	Penerbitan Izin Usaha Perikanan di Bidang Pembudidayaan Ikan yang Usahanya dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota
154	3.25.04.2.02	Pemberdayaan Pembudi Daya Ikan Kecil
155	3.25.04.2.03	Penerbitan Tanda Daftar bagi Pembudi Daya Ikan Kecil (TDPIK) dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota
156	3.25.04.2.04	Pengelolaan Pembudidayaan Ikan
157	3.25.06.2.01	Penerbitan Tanda Daftar Usaha Pengolahan Hasil Perikanan Bagi Usaha Skala Mikro dan Kecil
158	3.25.06.2.02	Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Bagi Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Mikro dan Kecil
159	3.25.06.2.03	Penyediaan dan Penyaluran Bahan Baku Industri Pengolahan Ikan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/ Kota
160	3.26.02.2.01	Pengelolaan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota
161	3.26.02.2.03	Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota
162	3.26.02.2.04	Penetapan Tanda Daftar Usaha Pariwisata Daerah Kabupaten/Kota
163	3.26.03.2.01	Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota
164	3.26.04.2.02	Pengembangan Ekosistem Ekonomi Kreatif
165	3.26.05.2.01	Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar
166	3.26.05.2.02	Pengembangan Kapasitas Pelaku Ekonomi Kreatif
167	3.27.02.2.01	Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian
168	3.27.02.2.02	Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan, Tumbuhan, dan Mikro Organisme Kewenangan Kabupaten/Kota
169	3.27.02.2.03	Peningkatan Mutu dan Peredaran Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak serta Pakan dalam Daerah Kabupaten/Kota
170	3.27.02.2.04	Pengawasan Obat Hewan di Tingkat Pengecer
171	3.27.02.2.05	Pengendalian dan Pengawasan Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit Ternak, dan Hijauan Pakan Ternak dalam Daerah Kabupaten/Kota
172	3.27.03.2.01	Pengembangan Prasarana Pertanian
173	3.27.03.2.02	Pembangunan Prasarana Pertanian
174	3.27.04.2.01	Penjaminan Kesehatan Hewan, Penutupan dan Pembukaan Daerah Wabah Penyakit Hewan Menular Dalam Daerah Kabupaten/Kota
175	3.27.04.2.03	Pengelolaan Pelayanan Jasa Laboratorium dan Jasa Medik Veteriner dalam Daerah Kabupaten/Kota
176	3.27.04.2.04	Penerapan dan Pengawasan Persyaratan Teknis Kesehatan Masyarakat Veteriner
177	3.27.05.2.01	Pengendalian dan Penganggulangan Bencana Pertanian Kabupaten/Kota
178	3.27.06.2.01	Penerbitan Izin Usaha Pertanian yang Kegiatan Usahanya dalam Daerah Kabupaten/Kota
179	3.27.07.2.01	Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian
180	3.30.02.2.02	Penerbitan Tanda Daftar Gudang
181	3.30.02.2.03	Penerbitan Surat Tanda Pendaftaran Waralaba (STPW) untuk Penerima Waralaba dari Waralaba Dalam Negeri
182	3.30.02.2.05	Penerbitan Surat Izin Usaha Perdagangan Minuman Beralkohol Golongan B dan C untuk Pengecer dan Penjual Langsung Minum di Tempat
183	3.30.02.2.06	Pengendalian Fasilitas Penyimpanan Bahan Berbahaya dan Pengawasan Distribusi, Pengemasan dan Pelabelan Bahan Berbahaya di Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota
184	3.30.03.2.01	Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan
185	3.30.03.2.02	Pembinaan Terhadap Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan Masyarakat di Wilayah Kerjanya
186	3.30.04.2.02	Pengendalian Harga, dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Pasar Kabupaten/Kota
187	3.30.04.2.03	Pengawasan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
188	3.30.05.2.01	Penyelenggaraan Promosi Dagang melalui Pameran Dagang dan Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan yang terdapat pada 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota
189	3.30.06.2.01	Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang, dan Pengawasan
190	3.30.07.2.01	Pelaksanaan Promosi, Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri
191	3.31.02.2.01	Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota
192	3.31.03.2.01	Penerbitan Izin Usaha Industri (IUI), Izin Perluasan Usaha Industri (IPIU), Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI) dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) Kewenangan Kabupaten/Kota
193	3.31.04.2.01	Penyediaan Informasi Industri untuk Informasi Industri untuk IUI, IPIU, IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten/Kota
194	3.32.03.2.01	Penataan Persebaran Penduduk yang Berasal dari 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota
195	3.32.04.2.01	Pengembangan Satuan Permukiman pada Tahap Kemandirian
196	4.01.02.2.01	Administrasi Tata Pemerintahan
197	4.01.02.2.02	Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat
198	4.01.02.2.03	Fasilitasi dan Koordinasi Hukum
199	4.01.02.2.04	Fasilitasi Kerjasama Daerah
200	4.01.03.2.01	Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian
201	4.01.03.2.02	Pelaksanaan Administrasi Pembangunan
202	4.01.03.2.03	Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa
203	4.01.03.2.04	Pemantauan Kebijakan Sumber Daya Alam
204	4.02.02.2.01	Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD
205	4.02.02.2.02	Pembahasan Kebijakan Anggaran
206	4.02.02.2.03	Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan
207	4.02.02.2.04	Peningkatan Kapasitas DPRD
208	4.02.02.2.05	Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat
209	4.02.02.2.08	Fasilitasi Tugas DPRD
210	5.01.02.2.01	Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan
211	5.01.02.2.02	Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah
212	5.01.02.2.03	Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah
213	5.01.03.2.01	Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia
214	5.01.03.2.02	Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)
215	5.01.03.2.03	Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan
216	5.02.02.2.01	Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah

217	5.02.02.2.02	Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah
218	5.02.02.2.03	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah
219	5.02.02.2.04	Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah
220	5.02.02.2.05	Pengelolaan Data dan Implementasi Sistem Informasi Pemerintah Daerah Lingkup Keuangan Daerah
221	5.02.03.2.01	Pengelolaan Barang Milik Daerah
222	5.02.04.2.01	Kegiatan Pengelolaan pendapatan Daerah
223	5.03.02.2.01	Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN
224	5.03.02.2.02	Mutasi dan Promosi ASN
225	5.03.02.2.03	Pengembangan Kompetensi ASN
226	5.03.02.2.04	Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur
227	5.05.02.2.01	Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan
228	5.05.02.2.04	Pengembangan Inovasi dan Teknologi
229	6.01.02.2.01	Penyelenggaraan Pengawasan Internal
230	6.01.02.2.02	Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu
231	6.01.03.2.01	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan
232	6.01.03.2.02	Pendampingan dan Asistensi
233	7.01.02.2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan
234	7.01.02.2.02	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan
235	7.01.02.2.04	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat
236	7.01.03.2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa
237	7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan
238	7.01.03.2.03	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan
239	7.01.04.2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum
240	7.01.04.2.02	Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah
241	7.01.04.2.03	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum
242	7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah
243	7.01.06.2.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa
244	8.01.02.2.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan
245	8.01.03.2.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitas Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik
246	8.01.04.2.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan
247	8.01.05.2.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya
248	8.01.06.2.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial
249	X.XX.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
250	X.XX.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
251	X.XX.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah
252	X.XX.01.2.04	Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah
253	X.XX.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
254	X.XX.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah
255	X.XX.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
256	X.XX.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
257	X.XX.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
258	X.XX.01.2.10	Peningkatan Pelayanan BLUD
259	X.XX.01.2.11	Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah
260	X.XX.01.2.12	Fasilitasi Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah
261	X.XX.01.2.13	Penataan Organisasi
262	X.XX.01.2.14	Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan
263	X.XX.01.2.15	Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD
264	X.XX.01.2.16	Layanan Administrasi DPRD

1	1.01.02.2.01.06	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah
2	1.01.02.2.01.08	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas
3	1.01.02.2.01.12	Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah
4	1.01.02.2.01.21	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar
5	1.01.02.2.01.22	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa
6	1.01.02.2.01.24	Penyiapan dan Tindak Lanjut Evaluasi Satuan Pendidikan Dasar
7	1.01.02.2.01.25	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa
8	1.01.02.2.01.29	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar
9	1.01.02.2.01.30	Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar
10	1.01.02.2.02.12	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah
11	1.01.02.2.02.24	Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah
12	1.01.02.2.02.32	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Pertama
13	1.01.02.2.02.37	Penyiapan dan Tindak Lanjut Evaluasi Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama
14	1.01.02.2.02.38	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa
15	1.01.02.2.02.41	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah
16	1.01.02.2.02.42	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama
17	1.01.02.2.02.43	Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama
18	1.01.02.2.03.02	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD
19	1.01.02.2.03.12	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa PAUD
20	1.01.02.2.03.14	Penyiapan dan Tindak Lanjut Evaluasi Satuan PAUD
21	1.01.02.2.03.18	Pengelolaan Dana BOP PAUD
22	1.01.02.2.03.19	Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOP PAUD
23	1.01.02.2.04.12	Penyelenggaraan Proses Belajar Nonformal/Kesetaraan
24	1.01.02.2.04.13	Penyiapan dan Tindak Lanjut Evaluasi Satuan Pendidikan di Pendidikan Nonformal/Kesetaraan
25	1.01.02.2.04.16	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Nonformal/Kesetaraan
26	1.01.02.2.04.17	Pengelolaan Dana BOP Sekolah Nonformal/Kesetaraan
27	1.01.02.2.04.18	Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOP Sekolah Nonformal/Kesetaraan
28	1.01.03.2.01.04	Pelatihan Penyusunan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Dasar
29	1.01.04.2.01.01	Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan
30	1.01.04.2.01.02	Penataan Pendistribusian Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan
31	1.02.02.2.01.10	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Fasilitas Kesehatan Lainnya
32	1.02.02.2.01.12	Pengadaan Sarana Fasilitas Pelayanan Kesehatan
33	1.02.02.2.01.13	Pengadaan Prasarana dan Pendukung Fasilitas Pelayanan Kesehatan
34	1.02.02.2.01.14	Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan
35	1.02.02.2.01.16	Pengadaan Obat, Vaksin
36	1.02.02.2.01.17	Pengadaan Bahan Habis Pakai
37	1.02.02.2.01.18	Pemeliharaan Sarana Fasilitas Pelayanan Kesehatan
38	1.02.02.2.01.20	Pemeliharaan Rutin dan Berkala Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan
39	1.02.02.2.02.01	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil
40	1.02.02.2.02.02	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin
41	1.02.02.2.02.03	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir
42	1.02.02.2.02.05	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar
43	1.02.02.2.02.07	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut
44	1.02.02.2.02.14	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana
45	1.02.02.2.02.15	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat
46	1.02.02.2.02.16	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga
47	1.02.02.2.02.17	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan
48	1.02.02.2.02.18	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan
49	1.02.02.2.02.20	Pengelolaan Surveilans Kesehatan
50	1.02.02.2.02.23	Pengelolaan Upaya Kesehatan Khusus
51	1.02.02.2.02.24	Pengelolaan Upaya Pengurangan Risiko Krisis Kesehatan dan Pasca Krisis Kesehatan
52	1.02.02.2.02.25	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular
53	1.02.02.2.02.26	Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat
54	1.02.02.2.02.32	Operasional Pelayanan Rumah Sakit
55	1.02.02.2.02.33	Operasional Pelayanan Puskesmas
56	1.02.02.2.02.34	Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya
57	1.02.02.2.02.35	Pelaksanaan Akreditasi Fasilitas Kesehatan di Kabupaten/Kota
58	1.02.02.2.02.38	Penyediaan dan Pengelolaan Sistem Penanganan Gawat Darurat Terpadu (SPGDT)
59	1.02.02.2.03.02	Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan
60	1.02.02.2.04.03	Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan
61	1.02.03.2.02.02	Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan sesuai Standar
62	1.02.03.2.03.01	Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
63	1.02.04.2.03.01	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga
64	1.02.04.2.06.01	Pemeriksaan Post Market pada Produk Makanan-Minuman Industri Rumah Tangga yang Beredar dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan
65	1.03.02.2.01.10	Pembangunan Bangunan Perkuatan Tebing
66	1.03.02.2.02.01	Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Irigasi dan Rawa
67	1.03.02.2.02.08	Peningkatan Jaringan Irigasi Permukaan
68	1.03.02.2.02.14	Rehabilitasi Jaringan Irigasi Permukaan
69	1.03.02.2.02.21	Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Permukaan
70	1.03.02.2.02.27	Operasional Unit Pengelola Irigasi
71	1.03.02.2.02.28	Pengelolaan dan Pengawasan Alokasi Air Irigasi
72	1.03.03.2.01.03	Pembangunan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perkotaan
73	1.03.03.2.01.04	Pembangunan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perdesaan
74	1.03.03.2.01.05	Peningkatan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perkotaan
75	1.03.03.2.01.17	Pembangunan Baru SPAM Bukan Jaringan Perpipaan di Kawasan Perdesaan
76	1.03.04.2.01.03	Pembangunan TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS
77	1.03.04.2.01.04	Rehabilitasi TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS
78	1.03.04.2.01.05	Peningkatan TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS
79	1.03.04.2.01.06	Penyediaan Sarana Persampahan
80	1.03.05.2.01.06	Pembangunan/Penyediaan Sub Sistem Pengolahan Setempat
81	1.03.05.2.01.12	Pembangunan/Penyediaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Terpusat Skala Permukiman
82	1.03.05.2.01.13	Penyediaan Sarana Pengangkutan Lumpur Tinja
83	1.03.06.2.01.01	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Drainase Perkotaan
84	1.03.06.2.01.02	Penyusunan Outline Plan pada Kawasan Genangan
85	1.03.06.2.01.03	Supervisi Pembangunan/Peningkatan/ Rehabilitasi Sistem Drainase Perkotaan
86	1.03.06.2.01.04	Pembinaan Teknik Sistem Drainase Perkotaan
87	1.03.06.2.01.05	Pembangunan Sistem Drainase Perkotaan
88	1.03.06.2.01.06	Peningkatan Saluran Drainase Perkotaan
89	1.03.06.2.01.07	Rehabilitasi Saluran Drainase Perkotaan

90	1.03.06.2.01.08	Penyediaan Sarana Sistem Drainase Perkotaan
91	1.03.06.2.01.09	Operasi dan Pemeliharaan Sistem Drainase
92	1.03.06.2.01.10	Supervisi Pembangunan/Peningkatan/ Rehabilitasi Sistem Drainase Lingkungan
93	1.03.06.2.01.11	Pembinaan Teknik Sistem Drainase Lingkungan
94	1.03.06.2.01.12	Pembangunan Sistem Drainase Lingkungan
95	1.03.06.2.01.13	Peningkatan Saluran Drainase Lingkungan
96	1.03.06.2.01.14	Rehabilitasi Saluran Drainase Lingkungan
97	1.03.06.2.01.15	Penyediaan Sarana Sistem Drainase Lingkungan
98	1.03.06.2.01.16	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Drainase Lingkungan
99	1.03.07.2.01.01	Pembangunan dan Pengembangan Infrastruktur Kawasan Permukiman di Kawasan Strategis Daerah Kabupaten/Kota
100	1.03.07.2.01.02	Pemanfaatan dan Pemeliharaan Infrastruktur Kawasan Permukiman di Kawasan Strategis Daerah Kabupaten/Kota
101	1.03.07.2.01.03	Pengawasan dan Pengendalian Infrastruktur Kawasan Permukiman di Kawasan Strategis Daerah Kabupaten/Kota
102	1.03.07.2.01.04	Pembinaan Penyelenggaraan Infrastruktur Kawasan Permukiman di Kawasan Strategis Daerah Kabupaten/Kota
103	1.03.08.2.01.01	Penyelenggaraan Penerbitan Izin Mendirikan Bangunan (IMB), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), peran Tenaga Ahli Bangunan Gedung (TABG), Pendataan Bangunan Gedung, serta Implementasi SIMBG
104	1.03.08.2.01.02	Perencanaan, Pembangunan, Pengawasan, dan Pemanfaatan Bangunan Gedung Daerah Kabupaten/Kota
105	1.03.08.2.01.03	Penyusunan Regulasi terkait Bangunan Gedung Kabupaten/Kota
106	1.03.08.2.01.04	Bantuan Teknis Pembangunan Bangunan Gedung Negara Daerah Kabupaten/Kota
107	1.03.09.2.01.03	Penataan Bangunan dan Lingkungan
108	1.03.09.2.01.04	Pemeliharaan Bangunan dan Lingkungan
109	1.03.09.2.01.06	Monitoring Penataan/Pemeliharaan Bangunan dan Lingkungan
110	1.03.10.2.01.01	Penyusunan Rencana, Kebijakan, dan Strategi Pengembangan Jaringan Jalan Serta Perencanaan Teknis Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan
111	1.03.10.2.01.04	Survey Kondisi Jalan/Jembatan
112	1.03.10.2.01.05	Pembangunan Jalan
113	1.03.10.2.01.08	Rekonstruksi Jalan
114	1.03.10.2.01.09	Rehabilitasi Jalan
115	1.03.10.2.01.10	Pemeliharaan Berkala Jalan
116	1.03.10.2.01.11	Pemeliharaan Rutin Jalan
117	1.03.10.2.01.12	Pembangunan Jembatan
118	1.03.10.2.01.16	Penggantian Jembatan
119	1.03.10.2.01.17	Pelebaran Jembatan
120	1.03.10.2.01.18	Rehabilitasi Jembatan
121	1.03.10.2.01.19	Pemeliharaan Rutin Jembatan
122	1.03.10.2.01.21	Penanggulangan Bencana/Tanggap Darurat
123	1.03.10.2.01.23	Pengawasan Teknis Penyelenggaraan Jalan/Jembatan
124	1.03.11.2.01.04	Pelaksanaan Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi
125	1.03.11.2.01.06	Fasilitasi Sertifikasi Tenaga Terampil Konstruksi
126	1.03.11.2.01.08	Pemantauan dan Evaluasi Kegiatan Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi
127	1.03.11.2.02.01	Pengelolaan Operasional Layanan Informasi Jasa Konstruksi
128	1.03.11.2.02.02	Penyediaan Perangkat Pendukung Layanan Informasi Jasa Konstruksi
129	1.03.11.2.02.03	Penyelenggaraan Pelatihan untuk Peningkatan Kapasitas Administrator SIPJAKI
130	1.03.11.2.02.04	Penyusunan Data dan Informasi Proyek Bidang PUPR yang dapat Dilaksanakan dengan Skema KPDBU
131	1.03.11.2.02.06	Penyusunan Data dan Informasi Tenaga Kerja dan Badan Usaha
132	1.03.11.2.02.07	Penyusunan Data dan Informasi Ketersediaan/Penggunaan Material dan Peralatan
133	1.03.11.2.02.08	Penyusunan Data dan Informasi Profil Pekerjaan Konstruksi
134	1.03.11.2.02.09	Penyusunan Data dan Informasi Tertib Penyelenggaraan Pekerjaan Konstruksi
135	1.03.11.2.03.02	Dukungan/Fasilitasi Penyelenggaraan Penerbitan Rekomendasi Teknis IUJK Nasional
136	1.03.11.2.03.05	Pemantauan dan Evaluasi IUJK Nasional yang telah Diterbitkan
137	1.03.11.2.04.02	Bimbingan Teknis tentang Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan, dan Tertib Pemanfaatan Jasa Konstruksi
138	1.03.11.2.04.03	Pengawasan dan Evaluasi Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan, dan Tertib Pemanfaatan Jasa Konstruksi
139	1.03.12.2.01.02	Pelaksanaan Persetujuan Substansi, Evaluasi, Konsultasi Evaluasi dan Penetapan RRTR Kabupaten/Kota
140	1.03.12.2.01.03	Penetapan Kebijakan dalam rangka Pelaksanaan Penataan Ruang
141	1.03.12.2.01.04	Sosialisasi Kebijakan dan Peraturan Perundang-undangan Bidang Penataan Ruang
142	1.03.12.2.02.02	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyusunan RRTR Kabupaten/Kota
143	1.03.12.2.02.03	Peningkatan Peran Masyarakat dalam Penataan Ruang
144	1.03.12.2.03.01	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang untuk Investasi dan Pembangunan Daerah
145	1.03.12.2.03.02	Sistem Informasi Penataan Ruang
146	1.03.12.2.04.02	Koordinasi dan Sinkronisasi Penertiban dan Penegakan Hukum Bidang Penataan Ruang
147	1.03.12.2.04.04	Koordinasi Pelaksanaan Penataan Ruang
148	1.04.02.2.01.05	Pendataan dan Verifikasi Penerima Rumah bagi Korban Bencana Alam atau Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota
149	1.04.02.2.06.03	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pembangunan dan Pengembangan Perumahan
150	1.04.03.2.02.01	Survei dan Penetapan Lokasi Perumahan dan Permukiman Kumuh
151	1.04.03.2.02.04	Penyadaran Publik Pencegahan Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh
152	1.04.03.2.03.01	Penyusunan Rencana Tapak (Site Plan) dan Detail Engineering Design (DED) Peremajaan/Pemugaran Permukiman Kumuh
153	1.04.03.2.03.02	Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni
154	1.04.03.2.03.06	Pelaksanaan Pembangunan Pemugaran/ Peremajaan Permukiman Kumuh
155	1.04.04.2.01.01	Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh diluar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (sepuluh) Ha
156	1.04.05.2.01.03	Koordinasi dan Sinkronisasi dalam rangka Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Perumahan
157	1.05.02.2.01.01	Pencegahan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawasan
158	1.05.02.2.01.02	Penindakan atas Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Berdasarkan Perda dan Perkada melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa
159	1.05.02.2.01.03	Koordinasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat Tingkat Kabupaten/Kota
160	1.05.02.2.01.04	Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketenteraman dan Ketertiban Umum
161	1.05.02.2.01.05	Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamongpraja dan Satuan Perlindungan Masyarakat termasuk dalam Pelaksanaan Tugas yang Bermanfaat Hak Asasi Manusia
162	1.05.02.2.01.07	Kerjasama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Teknik Pencegahan dan Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum
163	1.05.02.2.01.08	Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Ketenteraman dan Ketertiban Umum
164	1.05.02.2.01.09	Penyusunan SOP Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat
165	1.05.02.2.01.10	Penyediaan Layanan dalam rangka Dampak Penegakan Peraturan Daerah dan Perkada
166	1.05.02.2.02.01	Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota
167	1.05.02.2.02.02	Pengawasan atas Kepatuhan terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota
168	1.05.02.2.02.03	Penanganan atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota
169	1.05.02.2.03.01	Pengembangan Kapasitas dan Karier PPNNS
170	1.05.03.2.02.05	Pengelolaan Risiko Bencana Kabupaten/Kota
171	1.06.02.2.03.01	Peningkatan Kemampuan Potensi Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota
172	1.06.02.2.03.02	Peningkatan Kemampuan Potensi Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Kabupaten/Kota
173	1.06.02.2.03.04	Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota
174	1.06.03.2.01.01	Fasilitasi Pemulangan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan dari Titik Debarisasi di Daerah Kabupaten/Kota untuk dipulangkan ke Desa/Kelurahan Asal
175	1.06.04.2.01.01	Penyediaan Permaknaan
176	1.06.04.2.01.03	Penyediaan Alat Bantu
177	1.06.04.2.01.06	Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat
178	1.06.04.2.01.09	Pemberian Layanan Data dan Pengaduan

179	1.06.04.2.01.10	Pemberian Layanan Kedaruratan
180	1.06.04.2.01.11	Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga
181	1.06.04.2.01.12	Pemberian Layanan Rujukan
182	1.06.04.2.02.08	Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA
183	1.06.04.2.02.14	Kerjasama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Kabupaten/Kota
184	1.06.05.2.01.03	Pemantauan terhadap Pelaksanaan Pemeliharaan Anak Terlantar
185	1.06.05.2.02.02	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota
186	1.06.05.2.02.03	Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga
187	1.06.05.2.02.04	Fasilitasi Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat
188	1.06.06.2.01.01	Penyediaan Makanan
189	1.06.06.2.02.01	Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Kampung Siaga Bencana
190	1.06.06.2.02.02	Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana
191	1.06.07.2.01.03	Pengamanan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota
192	2.07.03.2.04.01	Pelaksanaan Konsultasi Produktivitas kepada Perusahaan Kecil
193	2.07.04.2.03.03	Job Fair/Bursa Kerja
194	2.07.04.2.04.01	Peningkatan Pelindungan dan Kompetensi Calon Pekerja Migran Indonesia (PMI)/Pekerja Migran Indonesia (PMI)
195	2.07.05.2.02.02	Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota
196	2.07.05.2.02.03	Penyelenggaraan Verifikasi dan Rekapitulasi Keanggotaan pada Organisasi Pengusaha, Federasi dan Konfederasi Serikat Pekerja/Serikat Buruh serta Non Afiliasi
197	2.08.02.2.01.01	Koordinasi dan Sinkronisasi Perumusan Kebijakan Pelaksanaan PUG
198	2.08.02.2.02.01	Sosialisasi Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi
199	2.08.02.2.03.01	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan kepada Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota
200	2.08.03.2.01.01	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota
201	2.08.03.2.02.02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota
202	2.08.03.2.03.02	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Penanganan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota
203	2.08.04.2.01.01	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan untuk Mewujudkan KG dan Perlindungan Anak Kewenangan Kabupaten/Kota
204	2.08.04.2.01.03	Pengembangan Kegiatan Masyarakat untuk Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota
205	2.08.06.2.01.01	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota
206	2.08.06.2.02.02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pendampingan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
207	2.08.07.2.01.01	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan terhadap Anak Kewenangan Kabupaten/Kota
208	2.08.07.2.01.02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pencegahan Kekerasan terhadap Anak Kewenangan Kabupaten/Kota
209	2.08.07.2.02.01	Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
210	2.08.07.2.02.02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pendampingan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Kabupaten/Kota
211	2.08.07.2.03.02	Koordinasi dan Sinkronisasi Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
212	2.09.02.2.01.04	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Infrastruktur Logistik
213	2.09.02.2.01.05	Penyusunan Rencana dan Peta Jalan Kebutuhan Infrastruktur Pendukung Kemandirian Pangan
214	2.09.03.2.01.01	Penyediaan Informasi Harga Pangan dan Neraca Bahan Makanan
215	2.09.03.2.01.03	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Distribusi Pangan Pokok dan Pangan Lainnya
216	2.09.03.2.01.04	Pemantauan Stok, Pasokan dan Harga Pangan
217	2.09.03.2.01.05	Pengembangan Kelembagaan dan Jaringan Distribusi Pangan
218	2.09.03.2.01.06	Pengembangan Kelembagaan Usaha Pangan Masyarakat dan Toko Tani Indonesia
219	2.09.03.2.02.01	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Cadangan Pangan Kabupaten/Kota
220	2.09.03.2.02.03	Pengadaan Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota
221	2.09.03.2.03.01	Koordinasi dan Sinkronisasi Penentuan Harga Minimum Pangan Pokok Lokal
222	2.09.03.2.04.01	Penyusunan dan Penetapan Target Konsumsi Pangan per Kapita per Tahun
223	2.09.03.2.04.02	Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengankaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal
224	2.09.03.2.04.03	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan dan Evaluasi Konsumsi per Kapita per Tahun
225	2.09.04.2.01.01	Penyusunan, Pemutakhiran dan Analisis Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan
226	2.09.04.2.02.01	Koordinasi dan Sinkronisasi Penanganan Kerawanan Pangan Kabupaten/Kota
227	2.09.04.2.02.02	Pelaksanaan Pengadaan, Pengelolaan, dan Penyaluran Cadangan Pangan pada Kerawanan Pangan yang Mencakup dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota
228	2.09.05.2.01.01	Penguatan Kelembagaan Keamanan Pangan Segar Daerah Kabupaten/Kota
229	2.09.05.2.01.02	Sertifikasi Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota
230	2.09.05.2.01.03	Registrasi Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota
231	2.09.05.2.01.04	Rekomendasi Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota
232	2.09.05.2.01.05	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengujian Mutu dan Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota
233	2.10.04.2.01.01	Inventarisasi Sengketa, Konflik, dan Perkara Pertanahan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota
234	2.10.05.2.01.02	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota
235	2.10.08.2.02.01	Pelaksanaan Inventarisasi Tanah Kosong
236	2.11.02.2.01.01	Penyusunan dan Penetapan RPPLH Kabupaten/Kota
237	2.11.03.2.01.01	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup Dilaksanakan terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut
238	2.11.03.2.01.03	Pengelolaan Laboratorium Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota
239	2.11.03.2.03.02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pembersihan Unsur Pencemar
240	2.11.03.2.03.04	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Rehabilitasi
241	2.11.04.2.01.01	Penyusunan dan Penetapan Rencana Pengelolaan Keanekaragaman Hayati
242	2.11.04.2.01.04	Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)
243	2.11.05.2.01.01	Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Izin Penyimpanan Sementara Limbah B3 Dilaksanakan melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik
244	2.11.05.2.01.02	Verifikasi Lapangan untuk Memastikan Pemenuhan Persyaratan Administrasi dan Teknis Penyimpanan Sementara Limbah B3
245	2.11.06.2.01.04	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan dan Penerapan Sanksi Upaya dan Rencana PPLH
246	2.11.08.2.01.03	Penyelenggaraan Penyuluhan dan Kampanye Lingkungan Hidup
247	2.11.09.2.01.01	Penilaian Kinerja Masyarakat/Lembaga Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia Pendidikan/ Filantropi dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup
248	2.11.10.2.01.01	Pengelolaan Pengaduan Masyarakat terhadap PPLH Kabupaten/Kota
249	2.11.11.2.01.03	Penanganan Sampah dengan melakukan Pemilahan, Pengumpulan, Pengangkutan, Pengolahan, dan Pemrosesan Akhir Sampah di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota
250	2.11.11.2.01.07	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota
251	2.11.11.2.03.02	Penyusunan dan Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Sampah
252	2.12.02.2.01.01	Pendataan Penduduk Non Permanen dan Rentan Administrasi Kependudukan
253	2.12.02.2.01.04	Peningkatan Pelayanan Pendaftaran Penduduk
254	2.12.02.2.01.05	Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen atas Laporan Peristiwa Kependudukan
255	2.12.02.2.02.02	Pengadaan Dokumen Kependudukan selain Blangko KTP-El, Formulir, dan Buku terkait Pendaftaran Penduduk sesuai dengan Kebutuhan
256	2.12.02.2.03.03	Fasilitasi Pendaftaran Penduduk
257	2.12.02.2.03.05	Sosialisasi Pendaftaran Penduduk
258	2.12.02.2.04.02	Pembinaan dan Pengawasan terkait Pendaftaran Penduduk
259	2.12.03.2.01.01	Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen atas Laporan Peristiwa Penting
260	2.12.03.2.01.02	Peningkatan dalam Pelayanan Pencatatan Sipil
261	2.12.03.2.01.05	Pengadaan Dokumen Kependudukan selain Blangko KTP-El, Formulir, dan Buku terkait Pencatatan Sipil sesuai dengan Kebutuhan
262	2.12.03.2.02.01	Koordinasi dengan Kantor Kementerian yang Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di Bidang Agama Kabupaten/Kota dan Pengadilan Agama yang Berkaitan dengan Pencatatan Nikah, Talak, Cerai, dan Rujuk bagi Penduduk yang Beragama Islam
263	2.12.03.2.02.06	Fasilitasi terkait Pencatatan Sipil
264	2.12.03.2.02.07	Penyelenggaraan Pemanfaatan Data Kependudukan terkait Pencatatan Sipil
265	2.12.03.2.02.08	Sosialisasi terkait Pencatatan Sipil
266	2.12.03.2.03.02	Pembinaan dan Pengawasan terkait Pencatatan Sipil
267	2.12.03.2.03.04	Bimbingan Teknis terkait Pencatatan Sipil

268	2.12.04.2.01.01	Pengolahan dan Penyajian Data Kependudukan
269	2.12.04.2.01.02	Kerjasama Pemanfaatan Data Kependudukan
270	2.12.04.2.03.01	Koordinasi Antar Lembaga Pemerintah dan Lembaga Non-Pemerintah di Kabupaten/Kota dalam Penertiban Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan
271	2.12.04.2.03.03	Fasilitas terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan
272	2.12.04.2.03.04	Penyelenggaraan Pemanfaatan Data Kependudukan
273	2.12.04.2.03.05	Sosialisasi terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan
274	2.12.04.2.04.01	Pembiayaan dan Pengawasan terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan
275	2.12.04.2.04.03	Bimbingan Teknis terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pendayagunaan Data Kependudukan
276	2.12.05.2.01.01	Penyediaan Data Kependudukan Kabupaten/Kota
277	2.12.05.2.01.02	Penyusunan Profil Data Perkembangan dan Proyeksi Kependudukan serta Kebutuhan yang lain
278	2.13.02.2.01.02	Fasilitas Tata Wilayah Desa
279	2.13.03.2.01.03	Fasilitas Pembangunan Kawasan Perdesaan
280	2.13.04.2.01.02	Fasilitas Penyusunan Produk Hukum Desa
281	2.13.04.2.01.03	Fasilitas Penyusunan Perencanaan Pembangunan Desa
282	2.13.04.2.01.04	Fasilitas Pengelolaan Keuangan Desa
283	2.13.04.2.01.05	Pembiayaan Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa
284	2.13.04.2.01.06	Fasilitas Penyelenggaraan Musyawarah Desa
285	2.13.04.2.01.08	Pembiayaan dan Pemberdayaan BUM Desa dan Lembaga Kerja sama antar Desa
286	2.13.04.2.01.11	Fasilitas Penyusunan Profil Desa
287	2.13.04.2.01.14	Pembiayaan Peningkatan Kapasitas Anggota BPD
288	2.13.04.2.01.15	Fasilitas Penetapan dan Penegasan Batas Desa
289	2.13.04.2.01.18	Fasilitas Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan
290	2.13.05.2.01.02	Fasilitas Penataan, Pemberdayaan dan Pendayagunaan Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat
291	2.13.05.2.01.03	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat
292	2.13.05.2.01.06	Fasilitas Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna
293	2.13.05.2.01.09	Fasilitas Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga
294	2.14.02.2.02.05	Penyusunan Kajian Dampak Kependudukan
295	2.14.02.2.02.11	Penyediaan Data dan Informasi Keluarga
296	2.14.02.2.02.12	Pencatatan dan Pengumpulan Data Keluarga
297	2.14.02.2.02.13	Pengolahan dan Pelaporan Data Pengendalian Lapangan dan Pelayanan KB
298	2.14.03.2.01.01	Advokasi Program KKBPK kepada Stakeholders dan Mitra Kerja
299	2.14.03.2.01.02	Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Program KKBPK sesuai Kearifan Budaya Lokal
300	2.14.03.2.01.04	Promosi dan KIE Program KKBPK Melalui Media Massa Cetak dan Elektronik serta Media Luar Ruang
301	2.14.03.2.01.05	Penggunaan Media Massa Cetak, Elektronik dan Media Lainnya sesuai Kearifan Budaya Lokal Dalam Pencitraan Program KKBPK
302	2.14.03.2.01.06	Pelaksanaan Mekanisme Operasional Program KKBPK melalui Rapat Koordinasi Kecamatan (Rakorcam), Rapat Koordinasi Desa (Rakordes), dan Mini Lokakarya (Minilok)
303	2.14.03.2.01.07	Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan KKBPK
304	2.14.03.2.01.08	Pengendalian Program KKBPK
305	2.14.03.2.02.03	Penguatan Pelaksanaan Penyuluhan, Penggerakan, Pelayanan dan Pengembangan Program KKBPK untuk Petugas Keluarga Berencana/Penyuluh Lapangan Keluarga Berencana (PKB/PLKB)
306	2.14.03.2.02.04	Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP)
307	2.14.03.2.03.01	Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya
308	2.14.03.2.03.03	Peningkatan Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)
309	2.14.03.2.03.05	Penyusunan Rencana Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi (Alokon) dan Sarana Penunjang Pelayanan KB
310	2.14.03.2.03.06	Penyediaan Sarana Penunjang Pelayanan KB
311	2.14.03.2.03.08	Pembiayaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan termasuk Jaringan dan Jejaringnya
312	2.14.03.2.04.01	Penguatan Peran serta Organisasi Kemasyarakatan dan Mitra Kerja Lainnya dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembiayaan Kesertaan Ber-KB
313	2.14.03.2.04.03	Pelaksanaan dan Pengelolaan Program KKBPK di Kampung KB
314	2.14.04.2.01.05	Penyediaan Biaya Operasional bagi Pengelola dan Pelaksana (Kader) Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)
315	2.14.04.2.01.07	Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)
316	2.14.04.2.01.08	Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (Menjadi Orang Tua Hebat, Generasi Berencana, Kelanjutan serta Pengelolaan Keuangan Keluarga)
317	2.15.02.2.02.01	Pembangunan Prasarana Jalan di Jalan Kabupaten/Kota
318	2.15.02.2.03.04	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Terminal (Fasilitas Utama dan Pendukung)
319	2.15.02.2.03.05	Peningkatan Kapasitas SDM Pengelola Terminal Tipe C
320	2.15.02.2.04.02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota
321	2.15.02.2.05.04	Penyediaan Bukti Lulus Uji Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor
322	2.15.02.2.05.07	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor
323	2.15.02.2.05.10	Monitoring dan Evaluasi Penyelenggaraan Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor
324	2.15.02.2.06.04	Pengawasan dan Pengendalian Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan untuk Jalan Kabupaten/Kota
325	2.15.02.2.06.05	Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Kabupaten/Kota
326	2.15.02.2.09.02	Pengendalian dan Pengawasan Ketersediaan Angkutan Umum untuk Jasa angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (satu) Kabupaten/Kota
327	2.15.02.2.16.03	Pengendalian dan Pengawasan Tarif Kelas Ekonomi Angkutan Orang dan Angkutan Perkotaan dan Perdesaan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota
328	2.15.03.2.02.02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Usaha Angkutan Laut Pelayaran Rakyat Kewenangan Kabupaten/Kota
329	2.16.02.2.01.04	Pengelolaan Konten dan Perencanaan Media Komunikasi Publik
330	2.16.02.2.01.05	Pengelolaan Media Komunikasi Publik
331	2.16.02.2.01.06	Pelayanan Informasi Publik
332	2.16.02.2.01.07	Layanan Hubungan Media
333	2.16.02.2.01.12	Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat, Media dan Kemitraan Komunitas
334	2.16.03.2.01.01	Pendaftaran Nama Domain Pemerintah Kabupaten/Kota
335	2.16.03.2.01.02	Penatalaksanaan dan Pengawasan Nama Domain dan Sub Domain dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
336	2.16.03.2.01.03	Penyelenggaraan Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah
337	2.16.03.2.02.01	Penatalaksanaan dan Pengawasan e-government dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
338	2.17.02.2.01.01	Fasilitas Pemenuhan Izin Usaha Simpan Pinjam dan Pembukaan Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota
339	2.17.03.2.01.01	Pengawasan Kekuatan, Kesehatan, Kemandirian, Ketangguhan, serta Akuntabilitas Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota
340	2.17.03.2.01.02	Periksaan Kepatuhan Koperasi terhadap Peraturan Perundang-Undangan Kewenangan Kabupaten/Kota
341	2.17.04.2.01.01	Pelaksanaan Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota
342	2.17.04.2.01.02	Penghargaan Kesehatan KSP/USP Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota
343	2.17.05.2.01.01	Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi
344	2.17.05.2.03.01	Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Usaha Mikro serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Usaha Mikro
345	2.17.06.2.01.01	Pemberdayaan Peningkatan Produktivitas, Nilai Tambah, Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota
346	2.17.07.2.01.01	Pendataan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro
347	2.17.07.2.01.03	Fasilitas Kemudahan Perizinan Usaha Mikro
348	2.17.07.2.01.04	Pemberdayaan Kelembagaan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro
349	2.17.07.2.01.05	Koordinasi dan Sinkronisasi dengan Para Pemangku Kepentingan dalam Pemberdayaan Usaha Mikro
350	2.17.08.2.01.01	Fasilitas Usaha Mikro Menjadi Usaha Kecil dalam Pengembangan Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, SDM, serta Desain dan Teknologi
351	2.18.02.2.01.01	Penetapan Kebijakan Daerah mengenai Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal
352	2.18.02.2.01.02	Evaluasi Pelaksanaan Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal
353	2.18.02.2.02.01	Penyusunan Rencana Umum Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota
354	2.18.02.2.02.02	Penyediaan Peta Potensi dan Peluang Usaha Kabupaten/Kota
355	2.18.03.2.01.01	Penyusunan Strategi Promosi Penanaman Modal
356	2.18.03.2.01.02	Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota

357	2.18.04.2.01.01	Penyediaan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Nonperizinan berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik
358	2.18.04.2.01.02	Pemantauan Pemenuhan Komitmen Perizinan dan Non Perizinan Penanaman Modal
359	2.18.04.2.01.03	Penyediaan Layanan Konsultasi dan Pengelolaan Pengaduan Masyarakat terhadap Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan
360	2.18.05.2.01.01	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan Pelaksanaan Penanaman Modal
361	2.18.05.2.01.02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pembinaan Pelaksanaan Penanaman Modal
362	2.18.05.2.01.03	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal
363	2.18.06.2.01.01	Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik
364	2.19.02.2.01.01	Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Daya Saing Pemuda Pelopor
365	2.19.02.2.01.02	Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Daya Saing Wira Usaha Pemuda
366	2.19.02.2.01.09	Penyelenggaraan Seleksi dan Pelatihan Pasukan Pengibar Bendera
367	2.19.03.2.02.02	Penyelenggaraan Kejuaraan dan Pekan Olahraga Tingkat Kabupaten/Kota
368	2.19.03.2.04.03	Peningkatan Kerja Sama Organisasi Keolahragaan Kabupaten/Kota Dengan Lembaga Terkait
369	2.19.03.2.05.03	Penyediaan, Pengembangan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Olahraga Rekreasi
370	2.20.02.2.01.01	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan Diseminasi Data Statistik Sektoral
371	2.20.02.2.01.02	Peningkatan kapasitas SDM Pemerintah Daerah dalam Peningkatan Mutu Statistik Daerah yang Terintegrasi
372	2.20.02.2.01.03	Membangun Metadata Statistik Sektoral
373	2.20.02.2.01.05	Pengembangan Infrastruktur
374	2.21.02.2.01.03	Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Berbasis Elektronik dan Non Elektronik
375	2.21.02.2.02.01	Operasionalisasi Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota
376	2.22.02.2.01.01	Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Kebudayaan
377	2.22.03.2.01.01	Peningkatan Pendidikan dan Pelatihan Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisional
378	2.23.02.2.01.04	Pembinaan Perpustakaan pada Satuan Pendidikan Dasar di Seluruh Wilayah Kabupaten/Kota sesuai dengan Standar Nasional Perpustakaan
379	2.23.02.2.01.08	Pengembangan Bahan Pustaka
380	2.23.02.2.01.09	Pengelolaan dan Pengembangan Bahan Pustaka
381	2.23.02.2.01.10	Penyusunan Data dan Informasi Perpustakaan, Tenaga Perpustakaan dan Pustakawan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
382	2.23.02.2.02.01	Sosialisasi Budaya Baca dan Literasi pada Satuan Pendidikan Dasar dan Pendidikan Khusus serta Masyarakat
383	2.23.02.2.02.03	Pemberian Penghargaan Gerakan Budaya Gemar Membaca
384	2.23.02.2.02.04	Pengembangan Literasi Berbasis Inklusi Sosial
385	2.24.02.2.01.01	Penciptaan dan Penggunaan Arsip Dinamis
386	2.24.02.2.03.01	Penyediaan Informasi, Akses dan Layanan Kearsipan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota melalui JIKN
387	2.24.02.2.03.02	Pemberdayaan Kapasitas Unit Kearsipan dan Lembaga Kearsipan Daerah Kabupaten/Kota
388	2.24.03.2.04.02	Penilaian dan Penetapan Hasil Alih Media sesuai Persyaratan Penjaminan Keabsahan Arsip
389	3.25.03.2.01.01	Penyediaan Data dan Informasi Sumber Daya Ikan
390	3.25.03.2.01.02	Penyediaan Prasarana Usaha Perikanan Tangkap
391	3.25.03.2.01.03	Penjaminan Ketersediaan Sarana Usaha Perikanan Tangkap
392	3.25.03.2.02.01	Pengembangan Kapasitas Nelayan Kecil
393	3.25.03.2.02.02	Pelaksanaan Fasilitas Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaan Nelayan Kecil
394	3.25.03.2.03.02	Pelayanan Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI)
395	3.25.04.2.01.02	Pelayanan Penerbitan Izin Usaha Perikanan Bidang Pembudidayaan Ikan yang Usahanya, Lokasi, dan/atau Manfaat atau Dampak Negatifnya dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota yang Menggunakan Teknologi Sederhana, Semi Intensif, dan Intensif, serta Tidak Menggunakan Modal Asing dan/atau Tenaga Kerja Asing
396	3.25.04.2.02.01	Pengembangan Kapasitas Pembudi Daya Ikan Kecil
397	3.25.04.2.02.02	Pelaksanaan Fasilitas Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaan Pembudi Daya Ikan Kecil
398	3.25.04.2.02.03	Pelaksanaan Fasilitas Bantuan Pendanaan, Bantuan Pembiayaan, Kemitraan Usaha
399	3.25.04.2.02.04	Pemberian Pendampingan, Kemudahan Akses Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Informasi, serta Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan
400	3.25.04.2.03.02	Pelayanan Penerbitan Tanda Daftar bagi Pembudi Daya Ikan Kecil (TDPIK) dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota
401	3.25.04.2.04.01	Penyediaan Data dan Informasi Pembudidayaan Ikan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota
402	3.25.04.2.04.02	Penyediaan Prasarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota
403	3.25.04.2.04.03	Penjaminan Ketersediaan Sarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota
404	3.25.04.2.04.04	Pengelolaan Kesehatan Ikan dan Lingkungan Budidaya dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota
405	3.25.04.2.04.06	Perencanaan, Pengembangan, Pemanfaatan dan Perlindungan Lahan untuk Pembudidayaan Ikan di Darat
406	3.25.06.2.01.01	Penyediaan Data dan Informasi Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota
407	3.25.06.2.02.01	Pelaksanaan Bimbingan dan Penerapan Persyaratan atau Standar pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Mikro dan Kecil
408	3.25.06.2.03.01	Peningkatan Ketersediaan Ikan untuk Konsumsi dan Usaha Pengolahan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota
409	3.25.06.2.03.02	Pemberian Fasilitas bagi Pelaku Usaha Perikanan Skala Mikro dan Kecil dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota
410	3.26.02.2.01.02	Perencanaan Pengembangan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota
411	3.26.02.2.01.04	Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota
412	3.26.02.2.03.03	Pengembangan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota
413	3.26.02.2.03.04	Pengadaan/Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota
414	3.26.02.2.03.05	Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota
415	3.26.02.2.03.06	Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota
416	3.26.02.2.04.04	Pembinaan dan Pengawasan Usaha Pariwisata
417	3.26.03.2.01.01	Penguatan Promosi melalui Media Cetak, Elektronik, dan Media Lainnya Baik Dalam dan Luar Negeri
418	3.26.03.2.01.02	Fasilitas Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri Pariwisata Kabupaten/Kota
419	3.26.03.2.01.03	Penyediaan Data dan Penyebaran Informasi Pariwisata Kabupaten/Kota, Baik Dalam dan Luar Negeri
420	3.26.03.2.01.04	Peningkatan Kerja Sama dan Kemitraan Pariwisata Dalam dan Luar Negeri
421	3.26.04.2.02.05	Pengembangan Sistem Pemasaran
422	3.26.05.2.01.01	Pengembangan Kompetensi SDM Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar
423	3.26.05.2.01.02	Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengembangan Kemitraan Pariwisata
424	3.26.05.2.01.03	Pelatihan Dasar SDM Kepariwisata bagi Masyarakat, Guru dan Pelajar (Mahasiswa dan/atau Siswa)
425	3.26.05.2.02.01	Pelatihan, Bimbingan Teknis, dan Pendampingan Ekonomi Kreatif
426	3.27.02.2.01.01	Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian sesuai dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi
427	3.27.02.2.01.02	Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian
428	3.27.02.2.02.01	Penjaminan Kemurnian dan Kelestarian SDG Hewar/Tanaman
429	3.27.02.2.02.02	Peningkatan Kualitas SDG Hewan/Tanaman
430	3.27.02.2.02.03	Pemanfaatan SDG Hewan/Tanaman
431	3.27.02.2.03.01	Pengawasan Mutu Benih/Bibit Ternak, Bahan Pakan/Pakan/Tanaman Skala Kecil
432	3.27.02.2.03.02	Pengawasan Peredaran Bahan Pakan/Pakan, Benih/Bibit Hijauan Pakan Ternak
433	3.27.02.2.04.01	Pemeriksaan Mutu, Khasiat dan Keamanan Peredaran Obat Hewan
434	3.27.02.2.05.05	Pengendalian Penyediaan Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak
435	3.27.02.2.05.06	Pengawasan Produksi Benih/Bibit Ternak dan HPT, Bahan Pakan/Pakan
436	3.27.03.2.01.01	Pengelolaan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LP2B, Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan/KP2B dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LCP2B
437	3.27.03.2.02.01	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Usaha Tani
438	3.27.03.2.02.02	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Embung Pertanian
439	3.27.03.2.02.03	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jalan Usaha Tani
440	3.27.03.2.02.04	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan DAM Parit
441	3.27.03.2.02.07	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rumah Potong Hewan
442	3.27.03.2.02.09	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Pertanian Lainnya
443	3.27.04.2.01.01	Pengendalian dan Penanggulangan Penyakit Hewan dan Zoonosis
444	3.27.04.2.01.02	Pembebasan Penyakit Hewan Menular dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota
445	3.27.04.2.03.02	Penyediaan Pelayanan Jasa Medik Veteriner

446	3.27.04.2.04.02	Pengawasan Peredaran Hewan dan Produk Hewan
447	3.27.04.2.04.04	Pengujian Laboratorium Kesehatan Masyarakat Veteriner
448	3.27.05.2.01.01	Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan
449	3.27.05.2.01.02	Penanganan Dampak Perubahan Iklim (DPI) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan
450	3.27.06.2.01.01	Penyusunan Standar Pelayanan Publik Pemberian Izin Usaha Pertanian
451	3.27.06.2.01.03	Pembinaan dan Pengawasan Penerapan Izin Usaha Pertanian
452	3.27.07.2.01.01	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa
453	3.27.07.2.01.02	Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa
454	3.27.07.2.01.03	Penyediaan dan Pemanfaatan Sarana dan Prasarana Penyuluhan Pertanian
455	3.30.02.2.02.01	Fasilitasi Penerbitan Tanda Daftar Gudang
456	3.30.02.2.03.01	Fasilitasi Perizinan Surat Tanda Pendaftaran dan/atau Lanjut Waralaba (STPW) Dalam Negeri Terintegrasi secara Elektronik
457	3.30.02.2.05.01	Fasilitasi Penerbitan Surat Izin Usaha Perdagangan Minuman Beralkohol Golongan B dan C
458	3.30.02.2.06.03	Pengawasan Distribusi, Pengemasan dan Pelabelan Bahan Berbahaya Terhadap Pengguna Akhir Bahan Berbahaya (PA-B2) maupun Produsen B2 (P-B2)
459	3.30.03.2.01.01	Penyediaan Sarana Distribusi Perdagangan
460	3.30.03.2.01.02	Fasilitasi Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan
461	3.30.03.2.02.01	Pembinaan dan Pengendalian Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan
462	3.30.04.2.02.01	Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang dalam 1 (satu) Kabupaten/Kota
463	3.30.04.2.02.02	Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pasar Rakyat yang Terintegrasi dalam Sistem Informasi Perdagangan
464	3.30.04.2.02.03	Pelaksanaan Operasi Pasar Reguler dan Pasar Khusus yang Berdampak dalam 1 (satu) Kabupaten/Kota
465	3.30.04.2.03.02	Pengawasan Pengadaan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi
466	3.30.04.2.03.03	Pengawasan Penyaluran dan Penggunaan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi
467	3.30.05.2.01.01	Pembinaan dan Pengembangan Usaha Produk Ekspor Unggulan Kabupaten/Kota
468	3.30.06.2.01.01	Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang
469	3.30.06.2.01.02	Pengawasan/Penyuluhan Metrologi Legal
470	3.30.07.2.01.02	Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Kabupaten/Kota
471	3.31.02.2.01.01	Penyusunan Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota
472	3.31.02.2.01.02	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Kebijakan Percepatan Pengembangan, Penyebaran dan Perwilayahan Industri
473	3.31.02.2.01.05	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat
474	3.31.02.2.01.06	Evaluasi terhadap Pelaksanaan Rencana Pembangunan Industri
475	3.31.03.2.01.01	Fasilitasi Pemenuhan Komitmen perolehan IUI, IPU, IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten/Kota dalam Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas) yang Terintegrasi dengan Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik
476	3.31.03.2.01.02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Perizinan di Bidang Industri Dalam Lingkup IUI, IPU, IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten/ Kota
477	3.31.04.2.01.02	Diseminasi, Publikasi Data Informasi dan Analisa Industri Kabupaten/Kota melalui SIINas
478	3.32.03.2.01.01	Koordinasi dan Sinkronisasi Kerjasama Pembangunan Transmigrasi yang Berasal dari 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota
479	3.32.04.2.01.01	Penguatan SDM dalam rangka Kemandirian Satuan Pemukiman
480	4.01.02.2.01.01	Penataan Administrasi Pemerintahan
481	4.01.02.2.01.02	Pengelolaan Administrasi Kewilayahan
482	4.01.02.2.01.03	Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah
483	4.01.02.2.02.01	Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual
484	4.01.02.2.02.02	Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja terkait Kesejahteraan Sosial
485	4.01.02.2.02.03	Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja terkait Kesejahteraan Masyarakat
486	4.01.02.2.03.01	Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Daerah
487	4.01.02.2.03.02	Fasilitasi Bantuan Hukum
488	4.01.02.2.03.03	Pendokumentasian Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum
489	4.01.02.2.04.01	Fasilitasi Kerja Sama Dalam Negeri
490	4.01.02.2.04.02	Fasilitasi Kerja Sama Luar Negeri
491	4.01.02.2.04.03	Evaluasi Pelaksanaan Kerja Sama
492	4.01.03.2.01.01	Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD
493	4.01.03.2.01.02	Pengendalian dan Distribusi Perekonomian
494	4.01.03.2.01.03	Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro kecil
495	4.01.03.2.02.01	Fasilitasi Penyusunan Program Pembangunan
496	4.01.03.2.02.02	Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan
497	4.01.03.2.02.03	Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan
498	4.01.03.2.03.01	Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa
499	4.01.03.2.03.02	Pengelolaan Layanan Pengadaan secara Elektronik
500	4.01.03.2.03.03	Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa
501	4.01.03.2.04.01	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Pertanian, Kehutanan, Kelautan, dan Perikanan
502	4.01.03.2.04.03	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Energi dan Air
503	4.02.02.2.01.01	Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah
504	4.02.02.2.01.02	Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah
505	4.02.02.2.02.01	Pembahasan KUA dan PPAS
506	4.02.02.2.02.02	Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS
507	4.02.02.2.02.03	Pembahasan APBD
508	4.02.02.2.02.04	Pembahasan APBD Perubahan
509	4.02.02.2.02.05	Pembahasan Laporan Semester
510	4.02.02.2.02.06	Pembahasan Pertanggungjawaban APBD
511	4.02.02.2.03.06	Pengawasan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Laporan Keuangan oleh Badan Pemeriksa Keuangan
512	4.02.02.2.04.02	Pendalaman Tugas DPRD
513	4.02.02.2.04.03	Publikasi dan Dokumentasi Dewan
514	4.02.02.2.04.04	Penyediaan Kelompok Pakar dan Tim Ahli
515	4.02.02.2.04.05	Penyediaan Tenaga Ahli Fraksi
516	4.02.02.2.04.06	Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat
517	4.02.02.2.04.07	Penyusunan Program Kerja DPRD
518	4.02.02.2.05.01	Kunjungan Kerja dalam Daerah
519	4.02.02.2.05.02	Penyusunan Pokok-Pokok Pikiran DPRD
520	4.02.02.2.05.03	Pelaksanaan Reses
521	4.02.02.2.08.01	Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD
522	4.02.02.2.08.02	Penyusunan Laporan Kinerja DPRD
523	4.02.02.2.08.04	Fasilitasi Tugas Pimpinan DPRD
524	5.01.02.2.01.03	Pelaksanaan Konsultasi Publik
525	5.01.02.2.01.05	Pelaksanaan Musrenbang Kabupaten/Kota
526	5.01.02.2.01.06	Penyiapan Bahan Koordinasi Musrenbang Kecamatan
527	5.01.02.2.01.07	Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota
528	5.01.02.2.02.01	Analisis Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah
529	5.01.02.2.02.02	Pembinaan dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan SKPD
530	5.01.02.2.03.03	Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah
531	5.01.03.2.01.01	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)
532	5.01.03.2.01.02	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan
533	5.01.03.2.01.04	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan
534	5.01.03.2.01.05	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia (RPJPD, RPJMD dan RKPD)

535	5.01.03.2.01.06	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia
536	5.01.03.2.01.08	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia
537	5.01.03.2.02.01	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian (RPJPD, RPJMD dan RKPD)
538	5.01.03.2.02.02	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian
539	5.01.03.2.02.04	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian
540	5.01.03.2.02.05	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA (RPJPD, RPJMD dan RKPD)
541	5.01.03.2.02.06	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA
542	5.01.03.2.02.08	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA
543	5.01.03.2.03.01	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur (RPJPD, RPJMD dan RKPD)
544	5.01.03.2.03.02	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur
545	5.01.03.2.03.04	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur
546	5.01.03.2.03.05	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)
547	5.01.03.2.03.06	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan
548	5.01.03.2.03.08	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan
549	5.02.02.2.01.01	Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS
550	5.02.02.2.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS
551	5.02.02.2.01.03	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi RKA-SKPD
552	5.02.02.2.01.04	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan RKA-SKPD
553	5.02.02.2.01.05	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi DPA-SKPD
554	5.02.02.2.01.06	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan DPA-SKPD
555	5.02.02.2.01.07	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD
556	5.02.02.2.01.08	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD
557	5.02.02.2.01.09	Koordinasi dan Penyusunan Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran
558	5.02.02.2.01.10	Koordinasi Perencanaan Anggaran Pendapatan
559	5.02.02.2.01.11	Koordinasi Perencanaan Anggaran Belanja Daerah
560	5.02.02.2.01.12	Koordinasi Perencanaan Anggaran Pembiayaan
561	5.02.02.2.01.13	Pembinaan Penganggaran Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota
562	5.02.02.2.02.01	Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah
563	5.02.02.2.02.03	Penyiapan, Pelaksanaan Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD
564	5.02.02.2.02.05	Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya
565	5.02.02.2.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/Pemotongan dan Penyeteroran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)
566	5.02.02.2.02.09	Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan Atas SP2D dengan Instansi Terkait
567	5.02.02.2.02.10	Penyusunan Petunjuk Teknis Administrasi Keuangan yang Berkaitan dengan Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Penatausahaan dan Pertanggungjawaban Sub Kegiatan
568	5.02.02.2.02.11	Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota
569	5.02.02.2.03.01	Koordinasi Pelaksanaan Akuntansi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah
570	5.02.02.2.03.02	Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan-LO dan Beban
571	5.02.02.2.03.04	Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah
572	5.02.02.2.03.05	Koordinasi dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota
573	5.02.02.2.03.06	Penyusunan Tanggapan/Tindak Lanjut terhadap LHP BPK atas Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD
574	5.02.02.2.03.07	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Penyelesaian Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Kerugian Daerah
575	5.02.02.2.03.09	Penyusunan Kebijakan dan Panduan Teknis Operasional Penyelenggaraan Akuntansi Pemerintah Daerah
576	5.02.02.2.03.11	Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten/Kota
577	5.02.02.2.04.08	Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan
578	5.02.02.2.04.09	Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak
579	5.02.02.2.04.10	Pengelolaan Dana Bagi Hasil Kabupaten/Kota
580	5.02.02.2.05.01	Inventarisasi dan Analisis Data Bidang Keuangan Daerah
581	5.02.02.2.05.02	Implementasi dan Pemeliharaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah
582	5.02.02.2.05.03	Pembinaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota
583	5.02.03.2.01.01	Penyusunan Standar Harga
584	5.02.03.2.01.02	Penyusunan Standar Barang Milik Daerah dan Standar Kebutuhan Barang Milik Daerah
585	5.02.03.2.01.03	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah
586	5.02.03.2.01.04	Penyusunan Kebijakan Pengelolaan Barang Milik Daerah
587	5.02.03.2.01.05	Penatausahaan Barang Milik Daerah
588	5.02.03.2.01.06	Inventarisasi Barang Milik Daerah
589	5.02.03.2.01.07	Pengamanan Barang Milik Daerah
590	5.02.03.2.01.08	Penilaian Barang Milik Daerah
591	5.02.03.2.01.09	Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan Barang Milik Daerah
592	5.02.03.2.01.10	Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah
593	5.02.03.2.01.11	Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah
594	5.02.03.2.01.12	Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah
595	5.02.03.2.01.13	Pembinaan Pengelolaan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota
596	5.02.04.2.01.01	Perencanaan pengelolaan pajak daerah
597	5.02.04.2.01.02	Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Pajak Daerah.
598	5.02.04.2.01.03	Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah
599	5.02.04.2.01.04	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah
600	5.02.04.2.01.05	Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah
601	5.02.04.2.01.06	Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah
602	5.02.04.2.01.07	Penilaian Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2) serta Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)
603	5.02.04.2.01.08	Penetapan Wajib Pajak Daerah
604	5.02.04.2.01.09	Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah
605	5.02.04.2.01.10	Penelitian dan Verifikasi Data Pelaporan Pajak Daerah
606	5.02.04.2.01.11	Penagihan Pajak Daerah
607	5.02.04.2.01.12	Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah
608	5.02.04.2.01.13	Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah
609	5.02.04.2.01.14	Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Retribusi Daerah
610	5.03.02.2.01.03	Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK
611	5.03.02.2.01.06	Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian
612	5.03.02.2.01.09	Perumusan Bahan Kebijakan Pengelolaan Data dan Informasi ASN
613	5.03.02.2.01.10	Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian
614	5.03.02.2.01.11	Pengelolaan Data Kepegawaian
615	5.03.02.2.01.12	Evaluasi Data, Informasi dan Sistem Informasi Kepegawaian
616	5.03.02.2.02.01	Pengelolaan Mutasi ASN
617	5.03.02.2.02.02	Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN
618	5.03.02.2.02.03	Pengelolaan Promosi ASN
619	5.03.02.2.03.01	Peningkatan Kapasitas Kinerja ASN
620	5.03.02.2.03.02	Pengelolaan Assessment Center
621	5.03.02.2.03.04	Pengelolaan Pendidikan Lanjutan ASN
622	5.03.02.2.03.05	Koordinasi dan Kerjasama Pelaksanaan Diklat
623	5.03.02.2.03.09	Koordinasi dan Kerjasama Pelaksanaan Diklat Jabatan Fungsional

624	5.03.02.2.03.14	Fasilitasi Pengembangan Karir dalam Jabatan Fungsional
625	5.03.02.2.04.01	Penyusunan Kebijakan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur
626	5.03.02.2.04.02	Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur
627	5.03.02.2.04.03	Evaluasi Hasil Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur
628	5.03.02.2.04.04	Pengelolaan Pemberian Penghargaan Bagi Pegawai
629	5.03.02.2.04.07	Pembinaan Disiplin ASN
630	5.03.02.2.04.08	Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN
631	5.05.02.2.01.01	Fasilitas, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Otonomi Daerah
632	5.05.02.2.01.12	Pengelolaan Data Kelitbangan dan Peraturan
633	5.05.02.2.01.14	Fasilitasi dan Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan Data dan Pengkajian Peraturan
634	5.05.02.2.04.01	Penelitian, Pengembangan, dan Perekayaan di Bidang Teknologi dan Inovasi
635	6.01.02.2.01.01	Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah
636	6.01.02.2.01.02	Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah
637	6.01.02.2.01.03	Reviu Laporan Kinerja
638	6.01.02.2.01.04	Reviu Laporan Keuangan
639	6.01.02.2.01.05	Pengawasan Desa
640	6.01.02.2.01.06	Kerjasama Pengawasan Internal
641	6.01.02.2.01.07	Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP
642	6.01.02.2.02.01	Penanganan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah
643	6.01.02.2.02.02	Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu
644	6.01.03.2.01.01	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan
645	6.01.03.2.01.02	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Fasilitasi Pengawasan
646	6.01.03.2.02.01	Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah
647	6.01.03.2.02.02	Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi
648	6.01.03.2.02.03	Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi
649	6.01.03.2.02.04	Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas
650	7.01.02.2.01.01	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait
651	7.01.02.2.01.02	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan
652	7.01.02.2.02.03	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan
653	7.01.02.2.04.01	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha
654	7.01.02.2.04.02	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan
655	7.01.03.2.01.01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa
656	7.01.03.2.01.03	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan
657	7.01.03.2.02.01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan
658	7.01.03.2.02.02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan
659	7.01.03.2.02.03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan
660	7.01.03.2.02.04	Evaluasi Kelurahan
661	7.01.03.2.03.01	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan
662	7.01.03.2.03.02	Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan
663	7.01.04.2.01.01	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan
664	7.01.04.2.01.02	Harmonisasi Hubungan Dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat
665	7.01.04.2.02.01	Koordinasi/Sinergi Dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia
666	7.01.04.2.03.01	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan
667	7.01.05.2.01.01	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia
668	7.01.05.2.01.03	Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa
669	7.01.05.2.01.04	Pembinaan Kerukunan Antarsuku dan Intrasuku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional
670	7.01.05.2.01.06	Pengembangan Kehidupan Demokrasi Berdasarkan Pancasila
671	7.01.06.2.01.01	Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa
672	7.01.06.2.01.02	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa
673	7.01.06.2.01.03	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa
674	7.01.06.2.01.05	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa
675	7.01.06.2.01.07	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa
676	7.01.06.2.01.11	Fasilitasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum
677	7.01.06.2.01.12	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan
678	7.01.06.2.01.16	Fasilitasi Penyusunan Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa
679	8.01.02.2.01.03	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan
680	8.01.02.2.01.04	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan
681	8.01.03.2.01.03	Pelaksanaan Kebijakan Di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitas Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik Di Daerah
682	8.01.04.2.01.03	Pelaksanaan Kebijakan dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah
683	8.01.05.2.01.03	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitas Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitas Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah
684	8.01.06.2.01.03	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitas Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah
685	X.XX.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
686	X.XX.01.2.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD
687	X.XX.01.2.01.03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD
688	X.XX.01.2.01.04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD
689	X.XX.01.2.01.05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD
690	X.XX.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
691	X.XX.01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
692	X.XX.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
693	X.XX.01.2.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN
694	X.XX.01.2.02.03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD
695	X.XX.01.2.02.04	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD
696	X.XX.01.2.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD
697	X.XX.01.2.02.06	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan
698	X.XX.01.2.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD
699	X.XX.01.2.02.08	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran
700	X.XX.01.2.03.01	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD
701	X.XX.01.2.03.02	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD
702	X.XX.01.2.03.03	Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD
703	X.XX.01.2.03.04	Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD
704	X.XX.01.2.03.05	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD
705	X.XX.01.2.03.06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD
706	X.XX.01.2.03.07	Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD
707	X.XX.01.2.04.01	Perencanaan Pengelolaan Retribusi Daerah
708	X.XX.01.2.04.03	Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Retribusi Daerah
709	X.XX.01.2.04.05	Pengolahan Data Retribusi Daerah
710	X.XX.01.2.04.07	Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah
711	X.XX.01.2.05.01	Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai
712	X.XX.01.2.05.02	Pengadaan Pakaian Dinas Berserta Atribut Kelengkapannya

713	X.XX.01.2.05.03	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian
714	X.XX.01.2.05.04	Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian
715	X.XX.01.2.05.05	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai
716	X.XX.01.2.05.09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi
717	X.XX.01.2.05.10	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan
718	X.XX.01.2.05.11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan
719	X.XX.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
720	X.XX.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
721	X.XX.01.2.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
722	X.XX.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor
723	X.XX.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
724	X.XX.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
725	X.XX.01.2.06.07	Penyediaan Bahan/Material
726	X.XX.01.2.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu
727	X.XX.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
728	X.XX.01.2.06.10	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD
729	X.XX.01.2.06.11	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD
730	X.XX.01.2.07.01	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
731	X.XX.01.2.07.02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
732	X.XX.01.2.07.05	Pengadaan Mebel
733	X.XX.01.2.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya
734	X.XX.01.2.07.09	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
735	X.XX.01.2.07.10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
736	X.XX.01.2.07.11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
737	X.XX.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat
738	X.XX.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
739	X.XX.01.2.08.03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor
740	X.XX.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
741	X.XX.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
742	X.XX.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
743	X.XX.01.2.09.05	Pemeliharaan Mebel
744	X.XX.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
745	X.XX.01.2.09.08	Pemeliharaan Aset Tak Berwujud
746	X.XX.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
747	X.XX.01.2.09.10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
748	X.XX.01.2.09.11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
749	X.XX.01.2.10.01	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD
750	X.XX.01.2.11.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah
751	X.XX.01.2.11.04	Penyediaan Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah
752	X.XX.01.2.12.03	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah
753	X.XX.01.2.13.01	Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan
754	X.XX.01.2.13.02	Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana
755	X.XX.01.2.13.03	Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi
756	X.XX.01.2.14.01	Fasilitasi Keprotokolan
757	X.XX.01.2.14.02	Fasilitasi Komunikasi Pimpinan
758	X.XX.01.2.14.03	Pendokumentasian Tugas Pimpinan
759	X.XX.01.2.15.01	Penyelenggaraan Administrasi Keuangan DPRD
760	X.XX.01.2.16.02	Fasilitasi Fraksi DPRD
761	X.XX.01.2.16.03	Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD